

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA KEUANGAN SKPD DKI JAKARTA**

***THE INFLUENCE OF CLARITY OF BUDGET TARGET ,
UNDERSTANDING OF ACCOUNTING , AND THE REGIONAL
FINANCIAL MANAGEMENT ON ACCOUNTABILITY FINANCIAL
PERFORMANCE AT SKPD DKI JAKARTA***

**IRWAN SETIAWANTO
8335072916**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

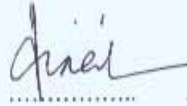
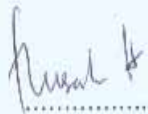
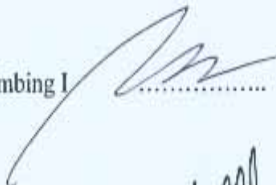
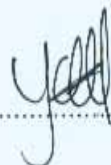
**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dra. Nurahma Hajat, M. Si
NIP. 19531002 198503 2 001

Nama	Jabatan	TandaTangan	Tanggal
1. <u>Dian Citra Aruna, SE., M. Si</u> NIP. 19760908 199903 2 001	Ketua		31/1/2012
2. <u>Nuramalia Hasanah, M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 002	Sekretaris		20/1/2012
3. <u>Indra Pahala, M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	PengujiAhli		24/1/2012
4. <u>RatnaAnggraini, S.E, Akt, M.Si</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Pembimbing I		26/1/2012
5. <u>M. Yasser Arafat, SE, Ak,M.M</u> NIP. 19710413 200112 1 001	Pembimbing II		21/1/2012

Tanggal Lulus: 17 Januari 2011

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 16 Januari 2012



Irwan Setiawanto
8335072916

ABSTRAK

Irwan Setiawanto. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman Akuntansi, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan SKPD DKI Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk (a) Mengetahui bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD dan (b) seberapa besar pengaruh antar variabel serta (c) mencoba memberikan saran dan masukan bagi perbaikan kualitas pemerintahan SKPD dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan

Metode pengambilan sample yang digunakan penulis adalah *simple random sampling*. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey melalui kuesioner, dan juga studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS. Pengujian Asumsi klasik yang digunakan peneliti meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Sedangkan model penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis statistik persamaan Regresi Linear Berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi simultan, uji signifikansi parsial, dan koefisien determinan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas, sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas, sedangkan pemahaman akuntansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil analisa regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R square*) sebesar 39,5%, yang artinya seluruh variabel independen memberikan korelasi yang cukup kuat terhadap variabel akuntabilitas.

Kata Kunci : Anggaran, Pemahaman Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas

ABSTRACT

Irwan Setiawanto. 2012. The Influence Of Budget Target Clarity, Understanding Of Accounting, and Regional Finance Management To Ffinancial Accountability Performance Of SKPD DKI Jakarta

This research is aiming to (a) knowing how the influence of clarity the target of budget, understanding of accounting, and the regional financial management on financial accountability performance of skpd and (b) how big the influence of inter variable and (c) tries to provide advice and input for improvement the quality of government skpd in relation to the regional financial report.

Sample retrieval method that used by the author is a simple random sampling. The data type used is the primary data, for techniques of data collection is done by means of a survey through questionnaires, and also the study of library. Data processing is carried out using SPSS program. Testing used classic assumptions research includes testing of normality, test multikolinieritas, and heterokedastisitas. While the research model used researchers is to use the Linear Regression equation of statistical analysis, as for Multiple hypothesis testing is done with simultaneous significance test, and the significance of partial coefficients of determinant.

Test results indicate that the budget target, variable clarity of understanding of accounting and financial management of influential simultaneously against accountability, while test results are partial indicates a variable target clarity of budget and financial management significantly give an influense to accountability, while understanding of accounting does not provide any significant effects. Results of the regression analysis shows the value of the coefficient of determinant (R square) of 39,5%, meaning that all independent variables provide a pretty strong correlation to the variable accountability.

Keywords: Accounting, Budget, Understanding Of Accounting, Financial Management, and Accountability.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dra. Nurahma Hajat, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak M. Yasser Arafat, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan bagi penulis
3. Ibu Dian Citra Aruna, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Strata Satu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Ibu Ratna Anggraeni, S.E., Akt, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan bagi penulis.
5. Kedua Orang Tua beserta seluruh Keluarga, yang telah memberikan dukungan, serta doanya.
6. Pimpinan SKPD DKI, dan juga para responden, yang telah memberikan kesempatan dan waktunya bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan banyak semangat dan dorongan kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, penulis hanya dapat berdoa semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dalam hal isi maupun teknik penyusunannya. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat menjadi khazanah baru dalam pengembangan ilmu akuntansi

Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1. Kajian Pustaka	8
2.1.1 Pengertian SKPD	8
2.1.2 Akuntabilitas.....	10
2.1.3 Anggaran	13
2.1.4 Pengelolaan Keuangan.....	16
2.1.5 Pemahaman Akuntansi.....	19
2.2. Review Penelitian Terdahulu.....	22
2.3. Kerangka Pemikiran	25
2.4. Hipotesis	27
 BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	28
3.2. Metodologi Penelitian	28
3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian	28
3.4. Metode Pengumpulan Data	32
3.5. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	32
3.6. Metode Analisis	33
3.7. Pengujian Hipotesis	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Unit Analisis	38
4.2. Analisis Data Penelitian.....	40
4.2.1 Uji Validitas.....	40
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	43

4.3 Statistik Deskriptif.....	44
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	43
4.4.1 Uji Normalitas	45
4.4.2 Uji Multikolinearitas	47
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	48
4.5. Uji Hipotesis	49
4.5.1 Analisis Regresi Berganda	49
4.5.2 Uji F	51
4.5.3 Koefisien Determinasi	52
4.5.4 Uji t	53
4.6. Pembahasan	54
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Keterbatasan & Saran	63
5.2.1 Keterbatasan	63
5.2.2 Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Landasan Penelitian Terdahulu	23
3.1	Indikator Tiap Variabel	30
4.1	Distribusi Kuesioner	39
4.2	Uji Validitas	42
4.3	Uji Reliabilitas	43
4.4	Descriptive Statistic	44
4.5	Uji Kolmogorov Smirnov	46
4.6	Uji Multikolinearitas	47
4.7	Uji Glejser	49
4.8	Regresi Linear Berganda	50
4.9	Output ANOVA	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	26
4.1	Grafik Normal P-Plot	46
4.2	Grafik Scatter Plot	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang bergulir diakhir dekade 90an membawa begitu banyak perubahan besar dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pasca reformasi, tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan semakin menguat, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Reformasi yang terjadi tidak hanya mengubah paradigma manajemen pemerintah pusat, tetapi juga manajemen pemerintah daerah, melalui pemberian otonomi dan kewenangan yang semakin luas. Semua ini merupakan upaya untuk mengubah pemerintahan menjadi lebih efektif, mandiri dan bertanggungjawab.

Dengan semakin luasnya kewenangan dan otonomi yang semakin luas bagi pemerintahan daerah, maka tentunya hal ini juga diiringi dengan semakin besarnya tanggungjawab pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut juga diiringi dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Menguatnya peran pemerintah daerah ini merupakan salah satu sarana untuk mendayagunakan kemampuan daerah, sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud.

Dengan kewenangan yang cukup besar tersebut, pemerintah daerah pada akhirnya juga dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan informasi terkait pengelolaan yang dilakukannya, terutama dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, dimana dalam hal ini salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah perubahan terkait prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, sebagai upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan mampu terwujud pemerintahan yang adil, bersih dan bertanggungjawab.

Namun disisi lain, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan nampaknya tetap sulit diwujudkan. Kenyataan ini terlihat dari tetap maraknya penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Berbagai paket perundang-undangan akhirnya dikeluarkan, sebagai upaya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih atau dikenal dengan istilah *Good Governance*, baik itu pada tingkat pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

Diantara Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah diperbaharui dengan dikeluarkannya PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diundangkannya peraturan tersebut, maka menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah untuk membuat dan menyajikan laporan keuangannya sesuai standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tidak berhenti sampai disitu, berbagai macam paket kebijakan susulan lainnya juga dikeluarkan, terutama menyangkut peraturan keuangan daerah. Diantaranya Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007. Salah satu poin yang menjadi tujuan dalam peraturan tersebut adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah, tidak hanya diperlukan pengelolaan keuangan yang berjalan dengan baik, tetapi juga perlu diiringi oleh pemahaman terhadap sistem akuntansi, serta pengawasan yang berkesinambungan (Tuasikal : 2008), serta kejelasan anggaran (Yahya dan Febrianty : 2007).

Akuntabilitas sangat berkaitan erat dengan pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban atas sumber daya yang dimiliki daerah. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Yahya dan Febrianty (2007), sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, maka instansi pemerintah melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama pertanggungjawaban vertikal kepada pusat, dan kedua pertanggungjawaban secara horizontal kepada lembaga legislatif dan masyarakat.

Hal ini menegaskan bahwa upaya menegakkan akuntabilitas tidak hanya dilakukan dalam tataran pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran dan pengelola keuangan dalam lingkup wilayah tertentu, masing-masing juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahannya. Apalagi saat ini desentralisasi, yang merupakan bagian dari reformasi manajemen pemerintahan, lebih banyak memberikan keluasaan dan

kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya secara mandiri.

Salah satu poin untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintah daerah, adalah kejelasan terkait sasaran anggaran yang menjadi tujuan, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh instansi akan memiliki ukuran yang jelas, karena salah satu peran anggaran adalah sebagai alat pengukur kinerja (Mardiasmo : 2002). Apalagi anggaran bagi instansi pemerintah merupakan sesuatu yang dimandatkan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Hal ini terwujud dalam bentuk laporan realisasi anggaran (LRA) yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh pemerintah.

Selain itu upaya perwujudan akuntabilitas dapat dilihat dari aspek pengelolaan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi salah satu agenda perubahan penting yang diusung dalam masa reformasi, karena semakin menguatnya tuntutan masyarakat, terutama mereka yang berpendidikan, untuk memperoleh informasi atas penggunaan sumber dana publik oleh instansi pemerintah, guna meminimalisir penyelewengan dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah

Dalam pelaksanaanya, upaya pengelolaan keuangan daerah lebih banyak melibatkan elemen yang ada dibawah kepala daerah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pelaksana fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, yang tentunya relatif lebih banyak menjalankan tugas operasional

pemerintahan daerah, dan penggunaan dana APBD. Sehingga pertanggungjawaban kepada publik tentunya sangat diperlukan bagi tiap unit SKPD. Seperti telah kita ketahui, bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, disusun berdasarkan laporan keuangan masing-masing unit SKPD serta laporan pertanggungjawaban perbendaharaan daerah. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan (Noviana : 2009). Kemudian laporan keuangan dari masing-masing SKPD tersebut akan digabung menjadi satu, berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Sayangnya, dalam upaya untuk mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jelas, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh SKPD, seperti pemahaman aparatur pemerintah daerah terkait akuntansi yang belum maksimal, dan selalu menjadi salah satu kendala teknis dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah (Newkirk: 1986 dalam Tuasikal: 2008). Padahal SKPD adalah elemen yang paling berperan dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Maka pemahaman akuntansi dalam hal keuangan daerah tentunya sangat diperlukan oleh aparatur SKPD untuk mempertanggungjawabkan penggunaan serta pengelolaan anggaran SKPD terkait.

Berdasarkan berbagai kondisi dan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait “pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pemahaman

akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta?
3. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi Instansi Pemda DKI, khususnya aparatur SKPD bagi perwujudan akuntabilitas keuangan daerah.
2. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) maupun Akuntansi Pemerintahan dan landasan bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi terkait pertanggungjawaban kinerja SKPD sebagai pengguna dan pelaksana APBD

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.(Nasution: 2009)

Adapun tugas dan wewenang dari pimpinan SKPD (Tanjung: 2009), adalah:

1. Menyusun Anggaran SKPD yang dipimpinnya
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
4. Melaksanakan pengujian atas tagihan, dan memerintahkan pembayaran

5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
6. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
7. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
9. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya
10. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kusa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
11. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

SKPD adalah entitas (konsep) akuntansi unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggungjawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Sedangkan laporan

keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari kata *accountability*, yang secara harfiah berarti yang dapat dipertanggungjawabkan. Suryanto (2008) membagi akuntabilitas menjadi 3 (tiga) jenis yaitu akuntabilitas politik, administratif dan finansial.

1. Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan.
2. Akuntabilitas administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara.
3. Akuntabilitas Finansial, dimana fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya

adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif

Sciavo—Campo dan Tomasi, dalam Mardiasmo (2006) menjelaskan akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan Halim (2004) secara ringkas mengatakan akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Tuntutan akuntabilitas menekankan tanggungjawab organisasi sektor publik tidak hanya secara vertikal kepada pimpinannya, tetapi juga secara horizontal, yang dalam pengertian ini tentunya mencakup masyarakat luas. *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) menyatakan dalam *Concepts Statement* No 1 tentang *Objectives of Financial Reporting*, bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang disasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Mardiasmo : 2006).

Akuntabilitas juga dapat dilihat dari berbagai perspektif (Sardjiato :2000). Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan setidaknya ada empat kelompok akuntabilitas dari suatu entitas, yaitu :

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah

Dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda, yaitu :

1. *Probity and legality accountability*
2. *Process accountability*
3. *Program accountability*
4. *Policy accountability*

Pelaksanaan akuntabilitas, sangat berkaitan erat dengan transparansi yang merupakan syarat pendukung bagi keterbukaan pemerintah terkait aktivitas pengelolaan sumber daya (Mardiasmo : 2006).

Sehingga dapat dipahami bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada pemberi amanat, dengan memperhatikan bagaimana realisasi pelaksanaan

amanat tersebut. Dalam suatu organisasi sektor publik khususnya pemerintahan, akuntabilitas ditunjukkan bagi seluruh lapisan elemen yang ada di masyarakat sebagai *stakeholders*.

2.1.3 Anggaran

Secara sederhana, anggaran dapat diartikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode (Bastian: 2006). Sedangkan Freeman dalam Noerdiawan (2009) mendefenisikan anggaran sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas

Secara ringkas, dapat dipahami bahwa anggaran merupakan alokasi atas pendapatan dan pengeluaran yang diperkirakan akan terjadi dimasa mendatang. Anggaran juga berperan sebagai aspek pengendalian akuntabilitas kinerja pemerintahan (Bastian: 2006). Ada beberapa jenis sistem penganggaran, diantaranya :

1. Line item budgeting

Line item budgeting adalah model penyusunan anggaran yang berdasarkan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Keberhasilan anggaran diukur sejauh mana organisasi mampu menghabiskan/ menyerap anggaran.

2. *Performance budgeting*

Performance budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi

3. *Zero based budgeting*

Zero based budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang dilakukan dimasa lalu.

4. *Planning programming budgeting system*

Planning programming budgeting system adalah suatu proses perencanaan, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah.

Dalam penganggaran, juga ditekankan konsep *good governance*, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Agere dalam Bastian: 2006). Selain itu,, dalam proses penganggaran, juga dikenal prinsip-prinsip Penganggggaran, yaitu :

1. Demokratis
2. Adil
3. Transparan
4. Bermoral tinggi

5. Berhat-hati

6. Akuntabel

Sedangkan Kejelasan Anggaran menurut Kennis dalam Andrias Bangun (2009), kejelasan sasaran anggaran, merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Adapun tujuan dan sasaran dari penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kriteria berikut (Dirjen Otonomi Daerah : 2001)

1. Spesifik. Sasaran yang akan dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
2. Terukur. Sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
3. Realistis. Sasaran harus menantang tetapi realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
4. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya
5. Memiliki batas waktu. Sasaran menentukan secara jelas kapan hasil akhir yang ditetapkan akan tercapai.

Pada akhirnya, dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan (Suhartono dan Solichin: 2006). Sehingga dengan kejelasan sasaran anggaran, maka pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak terkait akan memiliki ukuran dan indikator yang jelas.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Tuasikal: 2008)

Sedangkan Jaya dalam Fitrie (2008) mendefenisikan keuangan daerah sebagai seluruh tatanan perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Kemudian Mamesah dalam Halim (2002) memberikan definisi keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain, sesuai peraturan yang berlaku.

World Bank dalam Fitrie (2008), menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediktif, dan informatif.

Terdapat empat dimensi penting yang ada dalam keuangan daerah , yaitu : (1) Adanya dimensi hak dan kewajiban, (2) Adanya dimensi tujuan dan perencanaan (3) Dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik, (4) dimensi nilai uang dan barang. (Tuasikal : 2008).

Defenisi pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban (Syarifudin: 2005).

Adapun tujuan pengelolaan keuangan daerah menurut Devas et al dalam Azhar (2008) adalah

1. Tanggung jawab (accountability)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan, baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah hendaknya diserahkan kepada aparatur yang jujur dan bertanggungjawab, serta dapat dipercaya.

4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)

Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Aparatur pengelola keuangan daerah, DPRD, dan lembaga pengawas lainnya harus melakukan pengendalian agar semua tujuan pengelolaan keuangan dapat tercapai

Ada dua asas umum pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam PP No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaanya dilakukan oleh masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. (Waluyo: 2007). Selain itu, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah setidaknya ada tiga siklus pokok (Waluyo: 2007), yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa kegiatan penting, yaitu : (1)Perencanaan, (2)Pelaksanaan (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pengawasan, dan (6) Pertanggungjawaban atas keuangan daerah.

2.1.5 Pemahaman akuntansi

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah

(Renyowijoyo : 2010). Sedangkan pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Nordiawan, dkk : 2009). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset tetap/ barang milik daerah, serta prosedur akuntansi selain kas.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas publik, tentunya peranan pemahaman atas akuntansi sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan Purdy, Herbert et. al (1984) dalam Tuasikal (2008) yang menegaskan bahwa secara ekstrim penting bagi sebagian besar pengelola keuangan untuk memahami bagaimana informasi diperoleh, dianalisis, dan dilaporkan.

Dari penjelasan tersebut setidaknya ada tiga poin terkait pemahaman sistem akuntansi, yaitu (1) Memahami bagaimana informasi akuntansi diperoleh (2) Mampu Menganalisis Informasi yang dihasilkan, dan (3) Memahami Prosedur Pelaporan Keuangan.

Keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan bagi pemerintah daerah, juga sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah (Newkirk dalam Tuasikal : 2008). Ini menandakan bahwa peranan pegawai pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan akuntabilitas keuangan

daerah sangatlah penting. Dimana pegawai pemerintah harus memiliki pemahaman dan komitmen guna mewujudkan keberhasilan penerapan akuntansi bagi pemda

Sen dalam La Ode Hasiara (2009) mengatakan bahwa perkembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh berbagai hal, seperti: (a) sumber daya manusia, (b) keuangan yang baik, (c) alat yang cukup dan baik, (d) organisasi dan manajemen yang baik. Salah satu poin pentingnya adalah bahwa kualitas SDM yang mumpuni terutama dibidang akuntansi tentunya menjadi sebuah syarat bagi keberhasilan pengelolaan keuangan suatu daerah.

Pemahaman atas akuntansi diperlukan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, karena salah satu media yang relevan dalam mengkomunikasikan dan mengawasi proram-program pemerintah salah satunya adalah sistem akuntansi daerah (Tuasikal: 2008).

Sehingga bagi pengelola keuangan, sudah semestinya pemahaman akuntansi dimiliki dengan baik, karena hal ini berkaitan langsung dengan kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan. Apabila aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang baik dalam bidang akuntansi dan keuangan, maka laporan pertanggungjawaban keuangan pemda akan mampu memenuhi syarat akuntabel.

2.2. Review penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yahya dan Febrianty (2007) dengan variabel kejelasan anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja, dan sampel berupa seluruh badan dan instansi pemda kota banda aceh dengan hasil seluruh variabel berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nasution (2009), menggunakan komponen pengelolaan keuangan berupa variabel penyajian neraca dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD dengan sampel penelitian SKPD tingkat Provinsi Sumatera, memberikan hasil seluruh variabel bersama-sama atau serempak dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan SKPD.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Kadarmi (2008) yang mengambil lokasi untuk pengambilan sampel di 3 kabupaten dan 1 kota yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hasan (2007), yang melakukan penelitian pada dinas pendidikan kota Bekasi, dengan variabel pengelolaan keuangan dan

pengaruhnya terhadap akuntabilitas, dengan hasil penelitian, pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik

Adapun ringkasan dari sumber penelitian terdahulu, yang menjadi dasar dalam penelitian ini diringkas dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi	Hasil Penelitian
2008	Askam Tuasikal	Pengaruh Pengawasan, pemahaman sistem akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja unit SKPD	Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku	Secara parsial, pengawasan internal dan eksternal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2007	M. Nur Yahya Maya Febrianty Lautania	Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja	Instansi Pemda Kota Banda Aceh	Secara simultan dan parsial, seluruh variabel berpengaruh terhadap akuntabilitas

2009	Saufi Iqbal Nasution	Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Sumatera Utara	Sumatera Utara	Seluruh variabel X berpengaruh positif terhadap Y
2005	Dewi Fatra Hasan	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pendidikan Terhadap Akuntabilitas Publik Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Pengeolaan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Publik Dinas Pendidikan Kota Bekasi
2008	Tri Kadarmi	Pengaruh Penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Yogyakarta	penyajian neraca SKPD & aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD baik secara simultan maupun parsial.

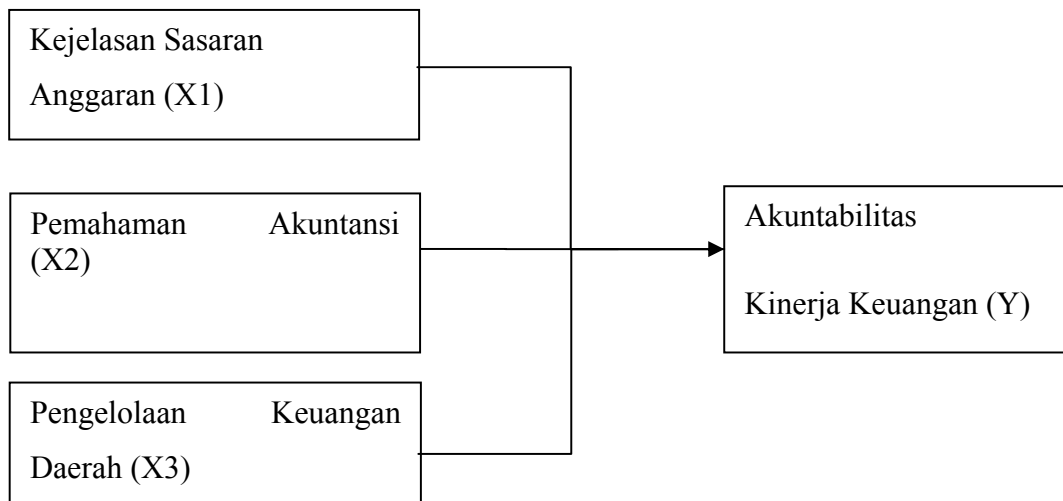
2010	Indraswari Kusumani ngrum	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemprov Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Seluruh Variabel berpengaruh positif dan signifikan
------	---------------------------------	--	--	---

2.3 Kerangka pemikiran

Akuntabilitas sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi. Apalagi akuntabilitas dan transparansi merupakan hak masyarakat sebagai *stakeholders* dalam organisasi pemerintahan. Dimensi akuntabilitas menjadi sebuah ukuran penting dalam reformasi manajemen keuangan negara dan daerah

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilakukan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah, tentunya melibatkan begitu banyak unit-unit pemerintahan. Dalam penyusunan APBD, SKPD sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang daerah memiliki wewenang untuk menyusun RKA SKPD, dan DPA SKPD, serta melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran kepada kepala daerah. Dalam pelaksanaan anggaran tentunya diperlukan kejelasan terkait sasaran penggunaannya, sehingga dapat diperoleh ukuran yang jelas bagi kinerja instansi pemerintahan.

Selain itu dalam pelaksanaan anggaran juga dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif, serta efisien, serta memenuhi hak dan tanggungjawab yang diamanahkan. Sayangnya upaya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya mengandalkan elemen tersebut. Selain melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka tentunya setiap SKPD yang ada juga perlu memiliki pemahaman yang memadai terkait sistem akuntansi, agar dapat membuat laporan keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Secara sederhana, kerangka pemikiran penulis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 = Kejelasan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah

H_2 = Pemahaman akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah

H_3 = Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah

H_4 = Kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Dinas tingkat provinsi DKI Jakarta. Alasan pemilihan unit satuan kerja terutama dinas sebagai objek penelitian, dikarenakan yang lebih berperan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah unit satuan kerja. Sedangkan dinas merupakan instansi dibawah pemerintah provinsi DKI Jakarta, dimana pemprov DKI adalah sebagai pemegang otonomi daerah.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kausatif, yang menganalisis pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti (Hasan: 2002). Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif, dengan penyebaran kuesioner yang mampu diukur dengan menggunakan angka interval, selain itu digunakan pula studi kepustakaan, untuk menganalisis pengaruh antar variabel.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah variabel yang

menjadi pengamatan dan dipengaruhi oleh variabel independen serta menjadi konsekuensi dari variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun negatif bagi variabel dependen lainnya.

Variabel dependen (terikat) yang ada dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja keuangan SKPD. Sedangkan yang menjadi variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran, pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan.

Variabel akuntabilitas merupakan ukuran pertanggungjawaban instansi pemerintah daerah terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran dan keuangan. Beberapa karakteristik akuntabilitas antara lain: (1) Berfokus pada hasil (2) Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk pengukuran (3) Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan (4) Menghasilkan data (Laporan) secara konsisten dari waktu ke waktu (5) Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur

Variabel kejelasan sasaran anggaran digunakan untuk mengetahui sejauh mana penjelasan dari tiap-tiap anggaran dan tujuan dari anggaran tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam anggaran adalah: (1) anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan non keuangan (2) anggaran mencakup jangka waktu tertentu (3) adanya pengendalian dalam anggaran (4) sasaran yang jelas (6) memberikan hasil dan dampak yang nyata serta terukur (Yahya, dan Febrianty: 2007)

Pemahaman sistem akuntansi adalah pemahaman aparatur SKPD mengenai sistem yang bertujuan memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, adapun yang perlu diperhatikan terkait pemahaman akuntansi adalah: (1) Memahami bagaimana informasi akuntansi (keuangan) diperoleh, (2) Memahami analisis atas informasi akuntansi, dan (3) Memahami prosedur pelaporan keuangan. (Herbert, et. Al dalam Tuasikal: 2008)

Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang mencakup: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan (4) pelaporan, (5) pertanggungjawaban dan (6) pengawasan keuangan, yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. (Waluyo: 2007) dan Halim (2002)

Indikator dari setiap variabel dirinci dalam tabel berikut

Tabel 3.1 Indilator Tiap Variabel

Variabel	Indikator	Referensi
Kejelasan	1. Satuan Keuangan & non	Dirjen Otonomi Daerah (2001)
Sasaran	keuangan	
Anggaran	2. Jangka waktu tertentu	Dirjen Otonomi Daerah (2001)
	3. Partisipasi	Bangun (2009)
	4. Sasaran	Dirjen Otonomi Daerah

	5. Pertanggungjawaban 6. Dampak 7. Prioritas 8. Pengendalian	(2001) Dirjen Otonomi Daerah (2001) Yahya & Febrianty (2007) Yahya & Febrianty (2007) Yahya & Febrianty (2007); Bastian (2001)
Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pemenuhan terhadap aturan perundang-undangan 2. Perencanaan dan Penganggaran 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban 6. Pengawasan	PP No 58 Tahun 2005 Waluyo (2007) Waluyo (2007); Tuasikal (2008) Waluyo (2007) Waluyo (2007) Waluyo (2007); Halim (2002)
Pemahaman Akuntansi	1. Perolehan Informasi akuntansi/ keuangan 2. Prosedur Pelaporan 3. Manfaat/penggunaan Informasi 4. Pendidikan & keahlian aparatur	Tuasikal (2008) Tuasikal (2008) Tuasikal (2008) Tuasikal (2008)

Akuntabilitas Kinerja	1. Sasaran/tujuan	Arja Sadjiarto (2001)
	2. Pengawasan	Mardiasmo (2001)
	3. Pengelolaan	Mardiasmo (2001)
	4. Evaluasi	Yahya, dan Febrianty (2007)
	5. Efisiensi, dan efektifitas	Yahya, dan Febrianty (2007),
	6. Pemenuhan peraturan	Mardiasmo (2001)
	7. Penyampaian laporan	Arja Sadjiarto (2001)

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh dengan alat bantu berupa kuesioner yang akan dikirimkan kepada aparatur keuangan dinas pemda DKI. Adapun kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan menggunakan skala likert 4 tingkatan.

3.5. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD tingkat provinsi DKI Jakarta, sedangkan populasi terjangkau dari penelitian ini adalah fungsi penatausahaan keuangan dinas yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling.

3.6 Metode Analisis

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan dan menunjukkan tingkat kehandalan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair *et al*, 2000). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika r hitung negatif atau r hitung $< r$ tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Indikator untuk uji reliabilitas adalah Cronbach Alpha, apabila nilai Cronbach Alpha > 0.6 maka menunjukkan instrumen yang digunakan reliabel (Nunnally, 1969 dalam Ghozali, 2002).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan sebagai salah satu prasyarat dalam analisis regresi. Adapun pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi 2 jenis uji asumsi klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Karena dalam pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafiknya histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian pula sebaliknya.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk melakukan pengujian multikolinearitas, dilakukan dengan melihat nilai signifikansi probabilitas t, atau dengan melihat nilai VIF

3. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk melakukan pengujian heterokedastisitas, dapat

dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*, atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji glejser.

3.7 Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis, digunakan alat analisis regresi berganda (multiple regression). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F

1. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen secara parsial. Bentuk pengujian dengan uji t adalah:

$H_0 : b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : b_1 \neq 0$, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% ($p\text{ value} < 0.05$), maka H_0 ditolak, dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% ($p\text{ value} < 0.05$), maka H_0 diterima, dan H_a ditolak

2. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen secara menyeluruh (simultan)

$H_0 : b_1=b_2=b_3=0$, artinya secara bersama-sama (serentak) variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama (serentak) variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengujian dengan menggunakan uji f adalah :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% ($p \text{ value} < 0.05$), maka H_0 ditolak, dan H_a diterima

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% ($p \text{ value} < 0,05$), maka H_0 diterima, dan H_a ditolak

Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam penelitian ini

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Keuangan SKPD

α = Koefisien konstanta

β_1 = koefisien variabel independen

X_1 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X_2 = Pemahaman Akuntansi

X_3 = Pengelolaan Keuangan Daerah

ε = Error Term

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Unit Penelitian

Unit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi DKI Jakarta, yang merupakan bagian dari pemerintahan DKI Jakarta. Dasar hukum bagi pemerintahan DKI Jakarta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini menggantikan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta, serta UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang keduanya tidak berlaku lagi.

Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri, karena otonomi Provinsi DKI Jakarta hanya diletakkan pada tingkat provinsi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur, serta berbagai macam perangkat daerah yang

lazim disebut SKPD. Masing-masing SKPD bertanggungjawab kepada pimpinan wilayah sesuai tingkatannya masing-masing. Adapun perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah. Dasar hukum bagi keberadaan SKPD ini diatur dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah

4.1.1 Deskriptif data

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat antu penelitian. Adapun jumlah kuesioner yang berhasil disebar sebanyak 60 kuesioner yang meliputi 6 instansi pemda DKI. Sedangkan yang terkumpul sebanyak 54 kuesioner, dan yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis berjumlah 50 kuesioner. Adapun responden yang dijadikan sampel adalah aparatur sub-bagian keuangan instansi pemda DKI

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner

Kuesioner yang disebar	60
Yang berhasil dikumpulkan	54

Pengujian asumsi klasik	-4
Digunakan dalam pegujian	50

4.2 Analisis Data Penelitian

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan pengujian data baik untuk deskripsi data penelitian maupun untuk pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan uji validitas dan Reliabilitas data. Uji ini perlu dilakukan karena jenis data penelitian adalah data primer, berupa kuesioner.

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menentukan ketepatan atau keabsahan suatu instrumen dalam suatu kuesioner. Apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Karena penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat bantu, maka uji validitas perlu dilakukan.

Pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan metode uji Korelasi *Pearson Product Moment*, dimana masing-masing item akan dikorelasikan dengan skor total. instrumen akan dinyatakan valid jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (dengan kriteria uji 2 sisi dengan taraf sigifikansi 5%)

Untuk item yang tidak valid, maka harus dikeluarkan dari kuesioner, dan dilanjutkan dengan uji validitas kembali. Setelah seluruh butir pertanyaan tersebut valid, baru dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

Dari hasil pengujian validitas pada variabel kejelasan sasaran anggaran, dari 10 butir pertanyaan yang diajukan, seluruh butir pertanyaan tersebut valid karena memiliki nilai *Pearson Product Moment* diatas 0,553. Sehingga seluruh butir pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk variabel pemahaman akuntansi, dari 7 butir pertanyaan yang diajukan, hanya tersisa 5 butir pertanyaan yang valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini, setelah melalui 3 kali pengujian dengan membuang butir pertanyaan yang tidak valid.

Untuk variabel pengelolaan keuangan daerah, dari 9 butir pertanyaan yang diajukan, seluruh butir pertanyaan valid, karena memiliki nilai *Pearson Product Moment* diatas r tabel, sehingga tidak perlu ada butir pertanyaan yang dibuang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian variabel akuntabilitas kinerja, dari 10 butir pertanyaan yang digunakan, hanya tersisa 7 butir pertanyaan yang valid, sedangkan ke 3 butir lainnya tidak memenuhi syarat validitas, sehingga harus dikeluarkan dari kuesioner.

Ringkasan pengujian masing-masing butir pertanyaan diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Uji Validitas

No	Variabel	Item Petanyaan	Keputusan
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	1	Valid
		2	Valid
		3	Valid
		4	Valid
		5	Valid
		6	Valid
		7	Valid
		8	Valid
		9	Valid
		10	Valid
2	Pemahaman Akuntansi	1	Valid
		2	Valid
		3	Valid
		4	Tidak valid
		5	Tidak valid
		6	Valid
		7	Valid
3	Pengelolaan Keuangan	1	Valid
		2	Valid
		3	Valid
		4	Valid
		5	Valid
		6	Valid
		7	Valid

		8	Valid
		9	Valid
4	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	1	Tidak valid
		2	Valid
		3	Tidak valid
		4	Valid
		5	Valid
		6	Valid
		7	Valid
		8	Valid
		9	Tidak valid
		10	Valid

4.2.2 Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen kuesioner, metode yang digunakan adalah *Cronbach Alpha*, dimana jika nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 maka instrumen yang digunakan adalah reliabel (Nunnally, 1969 dalam Ghozali, 2002).

Hasil uji reliabilitas tiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas.

Variabel	Cronbach's Alpha
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.786
Pemahaman Akuntansi	0.816
Pengelolaan Keuangan	0.797

Akuntabilitas	0.790
---------------	-------

Sumber SPSS 19, Data diolah Penulis 2011

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik layak digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4.3 Statistik Deskriptif

Tabel 4.4. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	50	26	40	31,72	3,747
PA	50	13	20	16,74	2,266
PK	50	25	36	31,16	3,925
AKB	50	17	28	21,50	3,196
Valid N (listwise)	50				

Sumber SPSS 19, data diolah penulis 2011

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian, penulis menggunakan data *descriptive statistic* yang tersaji diatas. Berdasarkan jawaban 50 responden yang ada, hasil pengukuran variabel akuntabilitas (Y) diperoleh skor jawaban rata-rata sebesar 21,50 dengan standar deviasi 3,196. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa representatifnya suatu rata-rata (mean).

Sedangkan hasil pengukuran variabel independen kejelasan sasaran anggaran (X1) diperoleh skor jawaban rata-rata tiap responden sebesar 31,16 dengan

standar deviasi 3,925. Sementara hasil pengukuran variabel pemahaman akuntansi (X2), dari jawaban 50 responden, diperoleh skor jawaban rata-rata sebesar 16,74 dengan standar deviasi 2,266. Untuk variabel pengelolaan keuangan daerah, dari jawaban 50 responden diperoleh skor rata-rata 31,16 dengan standar deviasi 3,925.

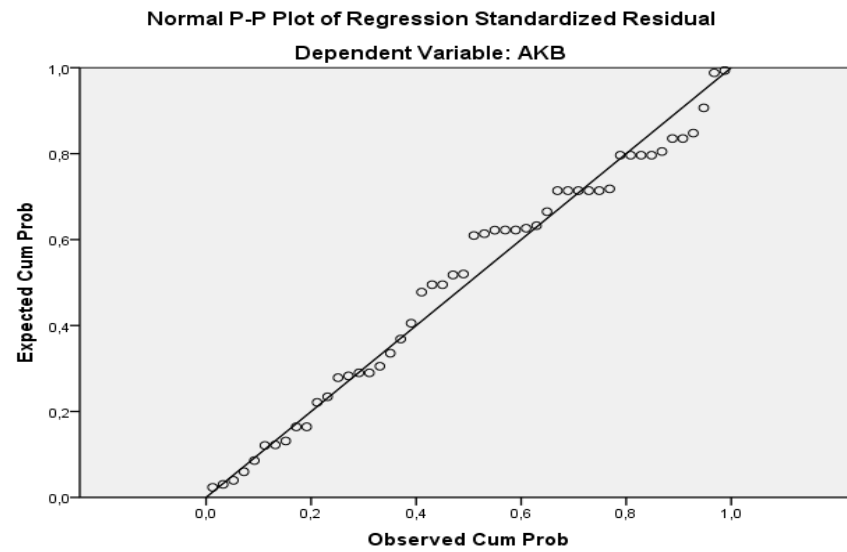
4.4 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan salah satu prasyarat dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear mensyaratkan terpenuhinya beberapa asumsi sebelum dilakukan uji hipotesis.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Adapun pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik *Normal P-Plot Of Regresion Standardized Residual* adapun kriteria pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas juga dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, dimana hasil pengujian menunjukkan nilai 0,604 dengan signifikansi 0,859, yang artinya asumsi normalitas terpenuhi dalam penelitian ini.

Tabel 4.5 Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0917719
	Std. Deviation	2,41468869
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,076
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		,604
Asymp. Sig. (2-tailed)		,859

Sumber SPSS 19. Data diolah penulis 2011

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linear diantara variabel-variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model adalah dengan melihat nilai yang dipakai untuk menandai adanya faktor multikolinearitas. Nilai yang dipakai adalah nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau *VIF* < 10 . Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai *VIF* < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak ada multikolinearitas sedangkan jika koefisien lebih dari sepuluh, maka akan mengandung multikolinearitas.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

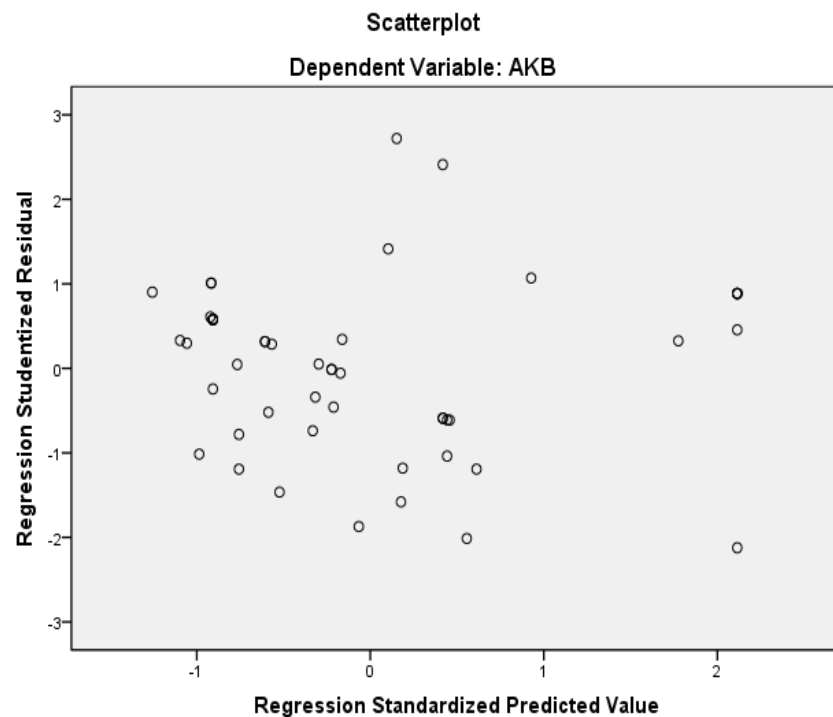
Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kejelasan Anggaran	,663	1,509
Pemahaman Akuntansi	,512	1,952
Pengelolaan Keuangan	,675	1,481

Sumber SPSS 19 data diolah penulis 2011

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini. Hal yang sama juga terlihat dari nilai *VIF*, dimana seluruh variabel memiliki nilai *VIF* < 10 .

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2001). Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas, sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang ada menyebar diatas dan dibawah angka 0 maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, dimana analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi dan pengelolaan

keuangan daerah terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja keuangan SKPD. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Variabel Dependen (Akuntabilitas Kinerja Keuangan)
X ₁	= Variabel Independen (Kejelasan Sasaran Anggaran)
X ₂	= Variabel Independen (Pemahaman Akuntansi)
X ₃	= Variabel Independen (Pengelolaan Keuangan Daerah)
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	= Koefisien Regresi
e	= Residual

hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,562	3,568		,157	,876
	KA	,356	,116	,418	3,059	,004
	PA	-,010	,219	-,007	-,047	,963
	PK	,315	,110	,387	2,858	,006

a. Dependent Variable: AKB

Sumber SPSS 19, data diolah penulis

Sehingga persamaan regresi yang didapat adalah :

$$Y = 0,562 + 0,350 X_1 + (-0,10) X_2 + 0,315 X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta (a) sebesar 0,562; yang artinya jika semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka variabel akuntabilitas memiliki nilai statistik sebesar 0,562
- b. Koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 0.356; artinya jika variabel kejelasan sasaran anggaran naik sebesar 1, maka akan mempengaruhi variabel akuntabilitas sebesar 0,356, dengan menganggap kedua variabel independen lainnya bernilai 0
- c. Koefisien regresi variabel pemahaman akuntansi (X_2) memiliki nilai sebesar $- 0,10$, artinya kenaikan variabel pemahaman akuntansi sebesar 1 akan menyebabkan penurunan nilai Y sebesar $- 0,10$ dengan menganggap kedua variabel independen lainnya bernilai 0
- d. Koefisien regresi variabel pengelolaan keuangan daerah (X_3) memiliki nilai 0,315, yang artinya peningkatan variabel pengelolaan keuangan daerah akan menyebabkan kenaikan variabel akuntabilitas sebesar 0,315, dengan anggapan kedua variabel independen lainnya bernilai 0

4.5.2 Uji signifikansi simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama atau serempak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan SKPD.

Nilai F hitung diperoleh melalui tabel ANOVA dari hasil perhitungan menggunakan alat bantu program SPSS

Tabel 4.9 Output ANOVA

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	216,045	3	72,015	11,646	,000 ^a
Residual	284,455	46	6,184		
Total	500,500	49			

Sumber SPSS 19, data diolah penulis

Berdasarkan tabel tersebut, nilai F hitung adalah $11,646 > F \text{ tabel } 3,195$ dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD.

4.5.3 Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian, melalui koefisien determinasi (Adjusted R square), maka hasil regresi pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD menunjukkan hasil sebesar 0,395 (39,5%) yang berarti variabel kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah, hanya mempengaruhi variabel akuntabilitas kinerja keuangan sebesar 39,5%, sedangkan sisanya 61,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

4.5.4 Uji t

Uji t dilakukan untuk menganalisis pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil koefisien 3,059, dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,059 > 2,009$) dan $\alpha > 5\%$, maka H_1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja keuangan SKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yahya & Febrianty (2007), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas instansi pemda banda aceh, serta Indraswati Kusumawaningrum (2010) yang meneliti hal serupa pada instansi pemda Jawa Tengah

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD. Namun berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai koefisien (-0,047) dengan signifikansi 0,963. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,047 < 2,009$) dan nilai signifikansi $0,963 > 0,05$. Maka hipotesis kedua ditolak, yang artinya variabel pemahaman akuntansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD. Ini sejalan dengan penelitian Tuasikal yang meneliti

pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kinerja keuangan SKPD Pemerintah Maluku.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD. Hasil analisis data, diperoleh nilai koefisien 2,858 dengan tingkat signifikansi 0,006. Melalui perbandingan nilai t hitung dengan t tabel ($2,858 > 2,009$) dan tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$ maka hipotesis ketiga diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD

4.6 Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian serupa yang dilakukan Yahya, dan Febrianty (2007), dan secara teoritis, pemahaman aparatur pemda terkait sasaran anggaran, seharusnya memang memberikan hubungan yang relatif kuat terhadap akuntabilitas, karena dalam implementasi otonomi daerah, kejelasan terkait tujuan dan maksud penggunaan anggaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan transparansi dan

akuntabilitas instansi pemerintah. Oleh karena itu sangatlah penting bagi penyusun anggaran dan penyusun laporan keuangan untuk mengetahui dengan jelas target dan tujuan serta efisiensi penggunaan dana APBD.

Salah satu pilar penting dalam penganggaran adalah aspek akuntabel (Bastian: 2006). Temuan empiris membuktikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran mampu mempengaruhi aspek akuntabilitas. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya terkait sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang telah berjalan dengan baik. Saat ini integrasi sistem penganggaran dengan keuangan merupakan hal yang sedang diupayakan untuk terus diperbaiki, terutama terkait penggunaan anggaran, yang jika dalam pelaksanaannya tidak diiringi pengawasan yang efisien, maka celah-celah yang ada akan menjadi penyebab kebocoran anggaran, sehingga dalam pelaporan realisasi anggaran, hal tersebut akan mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah terkait. Padahal dalam akuntansi pemerintahan, permasalahan budgeting ini menjadi hal yang sangat penting, bahkan merupakan sesuatu yang dimandatkan (Drebin 1981, dalam Halim 2002), karena penggunaan laporan realisasi anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana APBD yang rutin diterimanya.

Namun disisi lain keterkaitan yang cukup kuat antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas ini tidak serta merta menunjukkan baiknya laporan pertanggungjawaban rutin pemerintah. Hal ini karena nyatanya indikator tiap sasaran anggaran dalam laporan realisasi anggaran (LRA) seringkali tidak terukur secara jelas. Padahal seharusnya penyusunan anggaran yang baik dilaksanakan

berdasarkan capaian, indikator, standar satuan harga, dan standar belanja (Mardiasmo: 2006). Akibatnya dalam pelaporan keuangan instansi publik yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, masih belum mampu menyediakan informasi yang rinci terkait efisiensi dan ekonomisnya penggunaan anggaran.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Hasil pengujian variabel pemahaman akuntansi secara parsial menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas. Pengaruh negatif ini mungkin banyak dipengaruhi oleh munculnya berbagai regulasi baru di bidang akuntansi pemerintahan. Bahwa penerapan basis standar akuntansi bagi sektor pemerintahan baru terwujud tahun 2005 (60 tahun setelah kemerdekaan Indonesia) tentunya membuat pemerintah menyiapkan banyak peraturan yang terkesan terburu-buru tanpa memperhitungkan waktu penyesuaian bagi instansi pemerintahan. Namun hasil yang negatif ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Artinya kita dapat mengabaikan variabel pemahaman akuntansi dalam kaitanya dengan akuntabilitas kinerja keuangan.

Tidak signifikannya pengaruh ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya terbatasnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan manajemen keuangan atau akuntansi keuangan, serta faktor budaya (Tuasikal: 2009). Pemahaman aparatur pemda tentang sistem akuntansi, meskipun bukan merupakan sebuah hal yang bersifat prinsipil (pokok), aspek teknis ini tidak

boleh diremehkan. Jika aparaturnya yang ada tidak memiliki kemampuan dasar akuntansi, maka sudah dapat dipastikan pelaporan keuangan tidak akan memberikan hasil yang baik, malahan sebaliknya, yang akan berakibat buruk terhadap pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik. Apalagi dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan, masih belum terlalu memperhatikan aspek disiplin ilmu calon pegawai, dimana hal ini tentunya mau tidak mau akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah daerah itu sendiri. Meskipun secara kuantitatif jumlah SDM yang ada dibagikan keuangan sudah cukup banyak, namun keberadaan mereka tidak didukung kualitas yang memadai (Azhar : 2007)

Adapun faktor lain yang juga menentukan adalah sikap dan perilaku individu dalam organisasi pemerintahan, dimana dalam budaya organisasi pemerintahan, masih lebih berperannya aspek senioritas dibandingkan profesionalitas tentunya menjadi hambatan tersendiri. Selain itu kenyataan bahwa akuntansi pemerintahan di Indonesia baru berkembang setelah datangnya era reformasi, tentunya membuat aparaturnya keuangan pemerintah untuk banyak menyesuaikan diri dengan aturan baru yang diberlakukan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, standar akuntansi bagi sektor pemerintahan justru baru muncul puluhan tahun setelah Indonesia merdeka, dan dari standar tersebut dijabarkan lagi dalam sistem keuangan daerah. Hingga saat ini, upaya untuk terus membenahi dan memperbaiki sistem akuntansi pemerintahan terus dilakukan. Tentunya wajar saja jika pengaruh pemahaman akuntansi tidak memberikan hasil yang signifikan dalam penelitian ini.

Berbagai macam perubahan tersebut tidak serta merta membuat aparaturnya dan lembaga eksekutif pemerintah daerah tinggal diam. Berbagai macam diklat dan pembinaan terus ditingkatkan secara lebih intensif guna memaksimalkan kinerja aparaturnya keuangan pemda. Kenyataan bahwa masih belum terpenuhinya aspek wajar tanpa pengecualian dalam audit atas laporan keuangan pemda juga membuat instansi pemda untuk berbenah diri. Salah satunya adalah dengan perbaikan kualitas SDM yang ada. Namun tampaknya upaya tersebut belum mampu mencapai hasil yang diharapkan, yakni perbaikan kualitas SDM yang ada.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Hasil pengujian variabel pengelolaan keuangan daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatra Hasan dengan objek penelitian dinas pendidikan kota Bekasi yang memberikan hasil positif pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas. Hal ini setidaknya memberikan gambaran bahwa sistem pengelolaan keuangan yang melibatkan aspek perencanaan, penganggaran, dan penyusunan laporan keuangan menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD.

Adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam instansi pemerintahan membuat instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memiliki pedoman penyusunan laporan keuangan. Meskipun terbilang agak terlambat, namun upaya perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan

tersebut terbilang cukup berhasil. Para penyusun laporan keuangan memiliki panduan terkait informasi yang wajib diungkapkan dalam pelaporannya

Selain itu keberhasilan ini juga ditunjang dari keberadaan perangkat pendukung lain, seperti munculnya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) atau biasa disebut SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) dimana perangkat ini mampu memudahkan aparatur keuangan pemda untuk menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan mampu mengintegrasikan sistem administrasi keuangan dengan penganggaran dan pertanggungjawaban.

Sistem pengawasan keuangan daerah yang ada saat ini juga telah berjalan cukup baik, terutama semenjak datangnya era reformasi, dimana audit atas lembaga pemerintah merupakan kewajiban tiap instansi, tidak hanya pada tataran pusat saja namun diperluas juga hingga tingkat pemerintah daerah. Adanya audit rutin ini tentunya membuat instansi pemda lebih teliti dalam membuat penyusunan dan pelaporan keuangan, dimana kedua hal tersebut merupakan salah satu indikator utama pengelolaan keuangan. Tentunya pemerintah daerah tidak mau jika laporan keuangan yang dihasilkan setiap tahun hanya mendapat opini tidak wajar ataupun wajar dengan pengecualian. Maka perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus menerus diupayakan agar memenuhi aspek perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya dimaksudkan sebagai sarana pemerintah dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga *good governance* dapat terwujud.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Hasil dari pengujian secara simultan terhadap ketiga variabel independen, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah memberikan nilai yang signifikan dengan nilai F hitung $11,646 > F$ tabel $3,195$ dengan signifikansi $0,000$. Meskipun dalam pengujian secara parsial, terdapat variabel pemahaman akuntansi yang tidak memberikan pengaruh signifikan. Ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar $39,5\%$ terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Artinya masih banyak faktor lain yang berpengaruh disamping ketiga variabel tersebut. Apalagi aspek akuntabilitas pemerintahan di Indonesia terus berkembang, sehingga faktor-faktor lainnya masih akan terus bertambah.

Aspek luar dari lingkungan instansi pemda juga banyak mempengaruhi sistem akuntabilitas itu sendiri, seperti melalui pemeriksaan atau audit secara rutin (dimana hal ini merupakan faktor dari luar struktur organisasi pemda) tentu mempengaruhi sistem pertanggungjawaban pemda itu sendiri. Selain itu, peranan lembaga pengawasan juga berperan besar dalam perwujudan akuntabilitas pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa lembaga legislatif memiliki peran sebagai alat kontrol bagi lembaga eksekutif. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, maka fungsi pengawasan ini dipegang oleh DPRD, sebagai lembaga legislatif pemerintah daerah, yang sejatinya juga memiliki kewajiban mengawasi keuangan daerah.

Adapun implikasi dari penerapan akuntabilitas ini adalah terwujudnya *good governance* dalam lingkungan instansi pemda. Kenyataan bahwa sistem akuntabilitas yang ada saat ini masih merupakan perkembangan tahap awal dari reformasi manajemen pemerintahan, maka perkembangan tersebut juga diiringi dengan faktor-faktor lainnya yang tidak terungkap dalam penelitian ini. Pemerintah mengharapkan dengan keberhasilan akuntabilitas ini, mereka akan mampu memiliki ukuran yang jelas dalam pengambilan keputusan, serta mampu menggunakan sumber daya yang ada secara efektif.

Sayangnya, akuntabilitas yang ada saat ini hanya masih sebatas penerapan dan pemenuhan terhadap peraturan semata. Belum diiringinya akuntabilitas dengan transparansi juga menjadi pekerjaan rumah bagi instansi pemerintahan di Indonesia. Namun perkembangan yang ada saat ini, mampu menunjukkan upaya perbaikan kualitas pemerintahan yang terus berlangsung, tidak hanya dari segi hukum, namun juga ditinjau dari aspek keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD sebagai berikut :

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, pemahaman akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD DKI Jakarta
2. Koefisien Determinasi dari hasil pengujian menunjukkan nilai 0,395 yang artinya pengaruh ketiga variabel independen dalam menjelaskan akuntabilitas kinerja keuangan SKPD hanya sebesar 39,5% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.
3. Hasil pengujian terhadap variabel kejelasan sasaran anggaran secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.
4. Hasil pengujian secara parsial variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Hal ini membuktikan masih rendahnya kualitas SDM pemda dalam bidang keuangan

5. Hasil pengujian variabel pengelolaan keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan SKPD. Hal ini didukung oleh perbaikan dan reformasi sistem keuangan pemda.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah relatif masih sedikitnya jumlah sampel yang digunakan dalam pengujian, hanya berjumlah 50 sampel. Ditinjau dari aspek metodologis, jumlah sampel yang relatif kecil masih belum mampu memberikan gambaran utuh terhadap seluruh populasi SKPD yang ada di wilayah DKI Jakarta

5.2.2 Saran

1. Agar aspek akuntabilitas instansi pemda dapat terwujud dengan baik, hendaknya juga didukung dengan perbaikan dan peningkatan kualitas SDM. Reformasi dalam sistem penerimaan pegawai baru bisa saja ditetapkan guna menjamin kualitas SDM yang ada.
2. Adapun keberadaan sistem pengelolaan keuangan yang sudah baik, hendaknya tidak membuat instansi pemda merasa puas dengan pencapaian tersebut. Upaya perbaikan hendaknya terus dilakukan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan.
3. Penerapan akuntabilitas dilingkungan instansi pemda, juga seharusnya diiringi dengan meningkatnya transparansi dan partisipasi masyarakat.

4. Dalam publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah juga seharusnya melaksanakannya secara tepat waktu, agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan keuangan pemda.
5. Bagi peneliti lainnya yang berminat mengkaji ulang penelitian ini hendaknya dilakukan dengan memperbanyak jumlah sampel, sehingga hasil penelitian akan memberikan gambaran umum terhadap seluruh populas, selain itu juga dapat ditambahkan variabel lainnya yang berkaitan langsung dengan akuntabilitas kinerja keuangan, seperti transparansi dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Perbaikan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Azhar. 2007. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara
- Bangun, Andrias. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
- Bastari, Iman. 2004. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah. Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 2001. Modul Panduan Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Jakarta : Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Hasan, Dewi Fatra. 2009. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Pendidikan Terhadap Akuntabilitas Publik Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Hasiara, La Ode. 2009. Pemahaman Akuntansi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah Kabupaten Buton. Jurnal Ekonomi Bisnis No 2 p 132-150
- Mardiasmo. 2001. Pengaruh Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Bisnis dan Akuntansi vol 3 No 2 p. 441-456
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, makalah pada Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneter Indonesia. Jakarta

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 No 1 p 1-14
- Nordiawan, Deddi, et al. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta Salemba Empat
- Purwanto. 2001. Statistika Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rofikoh, Nurul. 2006. Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik vol. 10. No 1 p 51- 64
- Sadjiarto, Arja. 2001. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No 2 p 138-149
- Sopannah. 2005. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran, Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Logos vol. 3 No 1 p. 14- 32
- Suryanto. T tahun. Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Finance and Banking Journal, vol 10 No 1 p. 66-88
- Tim Penyusun Modul. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Yahya, Muhammad Nur, dan Maya Febrianty L. 2007 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala

Wiranto, Tatag. 2009. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik.
[www. Bappenas.go.id](http://www.Bappenas.go.id)

Kompas. 19 September 2011. Butuh Komitmen Pemimpin Perbaiki Laporan Keuangan

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

Berilah tanda silang (x) untuk pernyataan berikut ini, yang dianggap paling sesuai pada salah satu angka yang tersedia. Skor jawaban 1 sampai dengan 4, yaitu terdiri dari:

B. Kejelasan Sasaran Anggaran

NO.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Anggaran pada kantor ini dibuat secara spesifik/terinci baik dalam satuan keuangan maupun non keuangan (seperti target, waktu, prioritas, dsb)	1	2	3	4
2.	Anggaran tahunan dirinci untuk jangka waktu semesteran, triwulanan, dan bulanan	1	2	3	4
3.	Penyusunan anggaran melibatkan partisipasi, bagian, bidang, dan/ atau seksi	1	2	3	4
4.	Sasaran yang harus dicapai instansi, bagian, bidang dan atau seksi telah ditetapkan secara jelas	1	2	3	4
5.	Selain pendidikan, diperluan pula komitmen, keahlian dan keterampilan, yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran tahun ini	1	2	3	4
6.	Adanya penanggungjawab keuangan dalam setiap sasaran anggaran	1	2	3	4
7.	Anggaran yang tidak jelas tujuannya/membingungkan akan menimbulkan penyimpangan, dan menurunkan kinerja	1	2	3	4
8.	Anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas	1	2	3	4
9.	Dibutuhkan pengendalian dalam anggaran untuk mencapai tujuan yang direncanakan	1	2	3	4
10.	Adanya kejelasan output yang harus dicapai dalam setiap program	1	2	3	4

C. Pemahaman Akuntansi

NO.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan yang dibuat memberikan informasi akuntansi yang jelas & berguna dalam pengambilan keputusan	1	2	3	4
2.	Informasi akuntansi/ keuangan yang dihasilkan digunakan sebagai alat analisis kinerja	1	2	3	4
3.	Adanya prosedur dan alur yang jelas dalam penggunaan anggaran & pembuatan laporan keuangan	1	2	3	4
4.	Dilakukan pembiasaan dan pengarahan dibidang keuangan bagi pegawai baru secara berkala	1	2	3	4
5.	Adanya praktek kerja dan pemberian peran bagi pegawai baru	1	2	3	4

Keterangan

- | | | | |
|--------|-----------------------|-------|-----------------|
| 1. STS | = Sangat Tidak Setuju | 3. S | = Setuju |
| 2. TS | = Tidak Setuju | 4. SS | = Sangat Setuju |

D. Pengelolaan Keuangan

NO.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Laporan keuangan yang ada telah memenuhi peraturan yang berlaku (terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan)	1	2	3	4
2.	Adanya perencanaan keuangan dan alokasi sumber dana pada setiap program/aktivitas unit/sub unit	1	2	3	4
3.	Adanya alur yang jelas dan dokumen yang lengkap dalam penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan	1	2	3	4
4.	Selalu dibuat pelaporan jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan beserta realisasinya	1	2	3	4
5.	Adanya penanggungjawab keuangan yang jelas dalam setiap program/kegiatan	1	2	3	4
6.	Adanya analisis dan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya	1	2	3	4
7.	Hasil analisis digunakan sebagai bahan masukan bagi perbaikan program tahun berikutnya	1	2	3	4
8.	Adanya pengawasan dalam penggunaan anggaran/sumber pendanaan	1	2	3	4
9.	Adanya integrasi dalam pengurusan keuangan dengan sistem penganggaran	1	2	3	4

Keterangan

1. STS = Sangat Tidak Setuju/
(Tidak Pernah)

3. S = Setuju/
(Selalu Dilakukan)

2. TS = Tidak Setuju
(Jarang)

4. SS= Sangat Setuju
(Sangat Sering Dilakukan)

E. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

NO.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Kejelasan sasaran dan tujuan penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dimengerti oleh pimpinan dan semua staf/karyawan	1	2	3	4
2.	Adanya keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dan pengelolaan yang diterapkan	1	2	3	4
3.	Selalu diadakan pengawasan/pengecekan dalam penggunaan anggaran dan sumber pendanaan	1	2	3	4
4.	Dalam realisasi anggaran, selalu dicapai hasil yang ekonomis, efisien, dan efektif	1	2	3	4
5.	Selalu diadakan evaluasi antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya berdasarkan standar yang berlaku	1	2	3	4
6.	Dalam penggunaan APBD, telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan)	1	2	3	4
7.	Adanya pembuatan laporan dan juga publikasinya secara rutin kepada masyarakat	1	2	3	4

Keterangan

1. STS = Sangat Tidak Setuju

3. S = Setuju

2. TS = Tidak Setuju

4. SS = Sangat Setuju

Lampiran 2

Uji Validitas Y (akuntabilitas) Tahap 1

Correlations

		item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10	total
item1	Pearson Correlation	1	,000	,000	,479	,000	,000	,479	,000	,298	,553	,442
	Sig. (2-tailed)		1,000	1,000	,136	1,000	1,000	,136	1,000	,374	,078	,174
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item2	Pearson Correlation	,000	1	,194	,671*	,671*	,449	,261	,833**	-,023	,516	,734*
	Sig. (2-tailed)	1,000		,568	,024	,024	,166	,438	,001	,946	,104	,010
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item3	Pearson Correlation	,000	,194	1	-,108	,686*	,601	,289	,161	,292	-,083	,533
	Sig. (2-tailed)	1,000	,568		,751	,020	,050	,389	,635	,384	,808	,091
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item4	Pearson Correlation	,479	,671*	-,108	1	,542	,386	,542	,559	-,130	,770**	,718*
	Sig. (2-tailed)	,136	,024	,751		,085	,241	,085	,074	,704	,006	,013
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item5	Pearson Correlation	,000	,671*	,686*	,542	1	,810**	,542	,559	-,130	,241	,788**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,024	,020	,085		,003	,085	,074	,704	,476	,004
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item6	Pearson Correlation	,000	,449	,601	,386	,810**	1	,810**	,690*	-,336	,134	,712*
	Sig. (2-tailed)	1,000	,166	,050	,241	,003		,003	,019	,312	,695	,014
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item7	Pearson Correlation	,479	,261	,289	,542	,542	,810**	1	,559	-,415	,241	,647*
	Sig. (2-tailed)	,136	,438	,389	,085	,085	,003		,074	,205	,476	,031
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

item8	Pearson Correlation	,000	,833**	,161	,559	,559	,690*	,559	1	-,232	,430	,717*
	Sig. (2-tailed)	1,000	,001	,635	,074	,074	,019	,074		,493	,186	,013
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item9	Pearson Correlation	,298	-,023	,292	-,130	-,130	-,336	-,415	-,232	1	,449	,199
	Sig. (2-tailed)	,374	,946	,384	,704	,704	,312	,205	,493		,166	,557
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item10	Pearson Correlation	,553	,516	-,083	,770**	,241	,134	,241	,430	,449	1	,688*
	Sig. (2-tailed)	,078	,104	,808	,006	,476	,695	,476	,186	,166		,019
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
total	Pearson Correlation	,442	,734*	,533	,718*	,788**	,712*	,647*	,717*	,199	,688*	1
	Sig. (2-tailed)	,174	,010	,091	,013	,004	,014	,031	,013	,557	,019	
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji validitas tahap pertama, ada 3 item yang tidak valid, yaitu item1, 3 dan 9, sehingga ketiga item tersebut harus dikeluarkan

Uji validitas Y tahap ke 2

Correlations								
		item2	item4	item5	item6	item7	item8	item10
item2	Pearson Correlation	1	,671*	,671*	,449	,261	,833**	,516
	Sig. (2-tailed)		,024	,024	,166	,438	,001	,104
	N	11	11	11	11	11	11	11
								total
								,818**
								,002
								11

item4	Pearson Correlation	,671*	1	,542	,386	,542	,559	,770**	,810**
	Sig. (2-tailed)	,024		,085	,241	,085	,074	,006	,002
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item5	Pearson Correlation	,671*	,542	1	,810**	,542	,559	,241	,810**
	Sig. (2-tailed)	,024	,085		,003	,085	,074	,476	,002
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item6	Pearson Correlation	,449	,386	,810**	1	,810**	,690*	,134	,798**
	Sig. (2-tailed)	,166	,241	,003		,003	,019	,695	,003
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item7	Pearson Correlation	,261	,542	,542	,810**	1	,559	,241	,729*
	Sig. (2-tailed)	,438	,085	,085	,003		,074	,476	,011
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item8	Pearson Correlation	,833**	,559	,559	,690*	,559	1	,430	,864**
	Sig. (2-tailed)	,001	,074	,074	,019	,074		,186	,001
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item10	Pearson Correlation	,516	,770**	,241	,134	,241	,430	1	,592
	Sig. (2-tailed)	,104	,006	,476	,695	,476	,186		,055
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
total	Pearson Correlation	,818**	,810**	,810**	,798**	,729*	,864**	,592	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,002	,002	,003	,011	,001	,055	
	N	11	11	11	11	11	11	11	11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji reliabilitas variabel akuntabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
S	Case Valid	11	91,7
	Excluded ^a	1	8,3
	Total	12	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,801	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item2	36,91	19,291	,761	,768
item4	37,09	19,891	,707	,778
item5	37,09	19,491	,811	,769
item6	37,00	19,200	,814	,765
item7	37,09	19,891	,707	,778
item8	36,82	18,964	,839	,760
total	20,18	5,764	1,000	,897

Uji Validitas variabel Kejelasan anggaran (X1)

Correlations

		item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10	totalskor
item1	Pearson Correlation	1	1,000**	,828**	,722*	,607*	,812**	,810**	,690*	1,000**	,917**	,980**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,012	,048	,002	,003	,019	,000	,000	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item2	Pearson Correlation	1,000**	1	,828**	,722*	,607*	,812**	,810**	,690*	1,000**	,917**	,980**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,012	,048	,002	,003	,019	,000	,000	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item3	Pearson Correlation	,828**	,828**	1	,516	,449	,633*	,671*	,467	,828**	,760**	,812**
	Sig. (2-tailed)	,002	,002		,104	,166	,037	,024	,148	,002	,007	,002
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item4	Pearson Correlation	,722*	,722*	,516	1	,428	,686*	,346	,904**	,722*	,824**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,012	,012	,104		,190	,020	,297	,000	,012	,002	,002
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item5	Pearson Correlation	,607*	,607*	,449	,428	1	,236	,810**	,690*	,607*	,341	,647*
	Sig. (2-tailed)	,048	,048	,166	,190		,485	,003	,019	,048	,305	,031
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item6	Pearson Correlation	,812**	,812**	,633*	,686*	,236	1	,425	,481	,812**	,904**	,819**
	Sig. (2-tailed)	,002	,002	,037	,020	,485		,193	,134	,002	,000	,002
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item7	Pearson Correlation	,810**	,810**	,671*	,346	,810**	,425	1	,559	,810**	,510	,761**
	Sig. (2-tailed)	,003	,003	,024	,297	,003	,193		,074	,003	,109	,007
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item8	Pearson Correlation	,690*	,690*	,467	,904**	,690*	,481	,559	1	,690*	,633*	,797**

	Sig. (2-tailed)	,019	,019	,148	,000	,019	,134	,074		,019	,037	,003
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item9	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	,828**	,722*	,607*	,812**	,810**	,690*	1	,917**	,980**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,012	,048	,002	,003	,019		,000	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item10	Pearson Correlation	,917**	,917**	,760**	,824**	,341	,904**	,510	,633*	,917**	1	,922**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,007	,002	,305	,000	,109	,037	,000		,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
totalskor	Pearson Correlation	,980**	,980**	,812**	,824**	,647*	,819**	,761**	,797**	,980**	,922**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,002	,031	,002	,007	,003	,000	,000	
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas variabel X1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	11	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	11	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,786	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	67,64	81,455	,978	,762
item2	67,64	81,455	,978	,762
item3	67,73	82,818	,792	,768
item4	67,91	80,491	,800	,761
item5	67,64	84,655	,615	,775
item6	67,82	80,364	,794	,760
item7	67,55	84,073	,739	,773
item8	67,82	82,964	,776	,769
item9	67,64	81,455	,978	,762
item10	67,73	79,018	,910	,754
totalskor	35,64	22,655	1,000	,955

Uji validitas variabel pemahaman akuntansi (X2)

tahap pertama

Correlations									
		item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	total
item1	Pearson Correlation	1	,633*	,833**	-,149	,149	,267	1,000**	,757**
	Sig. (2-tailed)		,036	,001	,662	,662	,428	,000	,007
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item2	Pearson Correlation	,633*	1	,833**	-,149	,149	,633*	,633*	,757**
	Sig. (2-tailed)	,036		,001	,662	,662	,036	,036	,007
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item3	Pearson Correlation	,833**	,833**	1	-,124	,261	,467	,833**	,833**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001		,716	,438	,148	,001	,001
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item4	Pearson Correlation	-,149	-,149	-,124	1	,833**	,124	-,149	,339
	Sig. (2-tailed)	,662	,662	,716		,001	,716	,662	,309
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item5	Pearson Correlation	,149	,149	,261	,833**	1	,559	,149	,677*
	Sig. (2-tailed)	,662	,662	,438	,001		,074	,662	,022
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item6	Pearson Correlation	,267	,633*	,467	,124	,559	1	,267	,681*
	Sig. (2-tailed)	,428	,036	,148	,716	,074		,428	,021
	N	11	11	11	11	11	11	11	11
item7	Pearson Correlation	1,000**	,633*	,833**	-,149	,149	,267	1	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,036	,001	,662	,662	,428		,007
	N	11	11	11	11	11	11	11	11

Total	Pearson Correlation	,757**	,757**	,833**	,339	,677*	,681*	,757**	1
	Sig. (2-tailed)	,007	,007	,001	,309	,022	,021	,007	
	N	11	11	11	11	11	11	11	11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tahap ke 2

Correlations

		item1	item2	item3	item5	item6	item7	total
item1	Pearson Correlation	1	,633*	,833**	,149	,267	1,000**	,846**
	Sig. (2-tailed)		,036	,001	,662	,428	,000	,001
	N	11	11	11	11	11	11	11
item2	Pearson Correlation	,633*	1	,833**	,149	,633*	,633*	,846**
	Sig. (2-tailed)	,036		,001	,662	,036	,036	,001
	N	11	11	11	11	11	11	11
item3	Pearson Correlation	,833**	,833**	1	,261	,467	,833**	,919**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001		,438	,148	,001	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11
item5	Pearson Correlation	,149	,149	,261	1	,559	,149	,473
	Sig. (2-tailed)	,662	,662	,438		,074	,662	,142
	N	11	11	11	11	11	11	11
item6	Pearson Correlation	,267	,633*	,467	,559	1	,267	,686*
	Sig. (2-tailed)	,428	,036	,148	,074		,428	,020
	N	11	11	11	11	11	11	11

item7	Pearson Correlation	1,000**	,633*	,833**	,149	,267	1	,846**
	Sig. (2-tailed)	,000	,036	,001	,662	,428		,001
	N	11	11	11	11	11	11	11
Total	Pearson Correlation	,846**	,846**	,919**	,473	,686*	,846**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,142	,020	,001	
	N	11	11	11	11	11	11	11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tahap ke 3

Correlations

		item1	item2	item3	item6	item7	total
item1	Pearson Correlation	1	,633*	,833**	,267	1,000**	,885**
	Sig. (2-tailed)		,036	,001	,428	,000	,000
	N	11	11	11	11	11	11
item2	Pearson Correlation	,633*	1	,833**	,633*	,633*	,885**
	Sig. (2-tailed)	,036		,001	,036	,036	,000
	N	11	11	11	11	11	11
item3	Pearson Correlation	,833**	,833**	1	,467	,833**	,940**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001		,148	,001	,000
	N	11	11	11	11	11	11
item6	Pearson Correlation	,267	,633*	,467	1	,267	,624*
	Sig. (2-tailed)	,428	,036	,148		,428	,040
	N	11	11	11	11	11	11

item7	Pearson Correlation	1,000**	,633*	,833**	,267	1	,885**
	Sig. (2-tailed)	,000	,036	,001	,428		,000
	N	11	11	11	11	11	11
Total	Pearson Correlation	,885**	,885**	,940**	,624*	,885**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,040	,000	
	N	11	11	11	11	11	11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji reliabilitas pemahaman akuntansi

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	11	91,7
	Excluded ^a	1	8,3
	Total	12	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,816	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	31,73	15,618	,855	,774
item2	31,73	15,618	,855	,774
item3	31,82	15,364	,924	,766
item6	31,73	16,818	,543	,808
item7	31,73	15,618	,855	,774
Total	17,64	4,855	1,000	,899

Uji validitas pengelolaan keuangan

Correlations

		item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	total
item1	Pearson Correlation	1	1,000**	1,000**	,833**	,833**	1,000**	1,000**	1,000**	,467	,978**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,001	,000	,000	,000	,148	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item2	Pearson Correlation	1,000**	1	1,000**	,833**	,833**	1,000**	1,000**	1,000**	,467	,978**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,001	,000	,000	,000	,148	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item3	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	1	,833**	,833**	1,000**	1,000**	1,000**	,467	,978**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,001	,000	,000	,000	,148	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item4	Pearson Correlation	,833**	,833**	,833**	1	1,000**	,833**	,833**	,833**	,633*	,918**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,001		,000	,001	,001	,001	,036	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item5	Pearson Correlation	,833**	,833**	,833**	1,000**	1	,833**	,833**	,833**	,633*	,918**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,001	,000		,001	,001	,001	,036	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item6	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	1,000**	,833**	,833**	1	1,000**	1,000**	,467	,978**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,001		,000	,000	,148	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item7	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	1,000**	,833**	,833**	1,000**	1	1,000**	,467	,978**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,001	,000		,000	,148	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

item8	Pearson Correlation	1,000**	1,000**	1,000**	,833**	,833**	1,000**	1,000**	1	,467	,978**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,001	,000	,000		,148	,000
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
item9	Pearson Correlation	,467	,467	,467	,633*	,633*	,467	,467	,467	1	,609*
	Sig. (2-tailed)	,148	,148	,148	,036	,036	,148	,148	,148		,047
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Total	Pearson Correlation	,978**	,978**	,978**	,918**	,918**	,978**	,978**	,978**	,609*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,047	
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji reliabilitas pengelolaan Keuangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	11	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	11	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

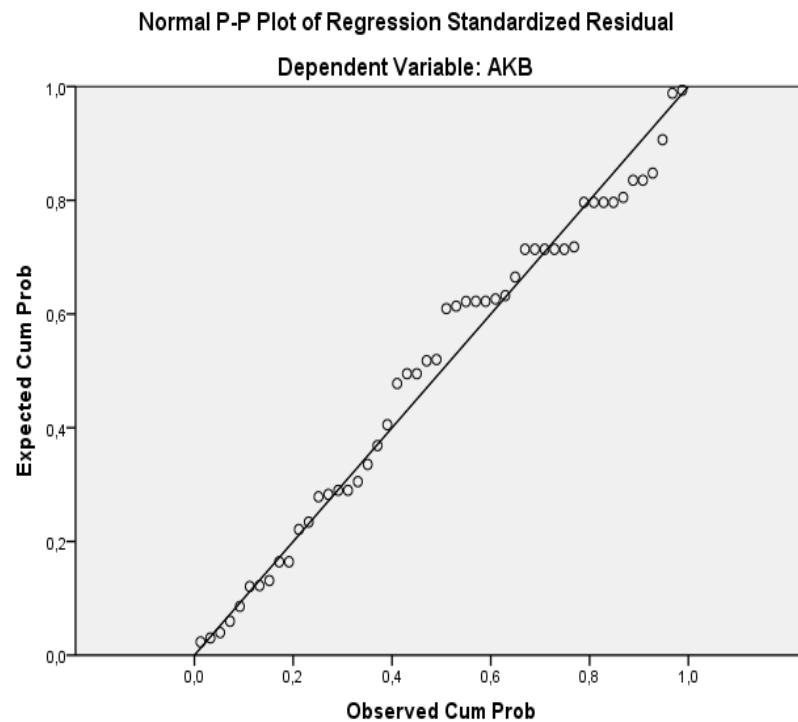
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,797	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	59,73	66,818	,975	,771
item2	59,73	66,818	,975	,771
item3	59,73	66,818	,975	,771
item4	59,82	67,364	,908	,774
item5	59,82	67,364	,908	,774
item6	59,73	66,818	,975	,771
item7	59,73	66,818	,975	,771
item8	59,73	66,818	,975	,771
item9	59,82	70,164	,569	,788
Total	31,64	18,855	1,000	,979

Normalitas *P Plot*



Kolmogorov Smirnov test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0917719
	Std. Deviation	2,41468869
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,076
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		,604
Asymp. Sig. (2-tailed)		,859

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multi linearitas

Coefficients^a

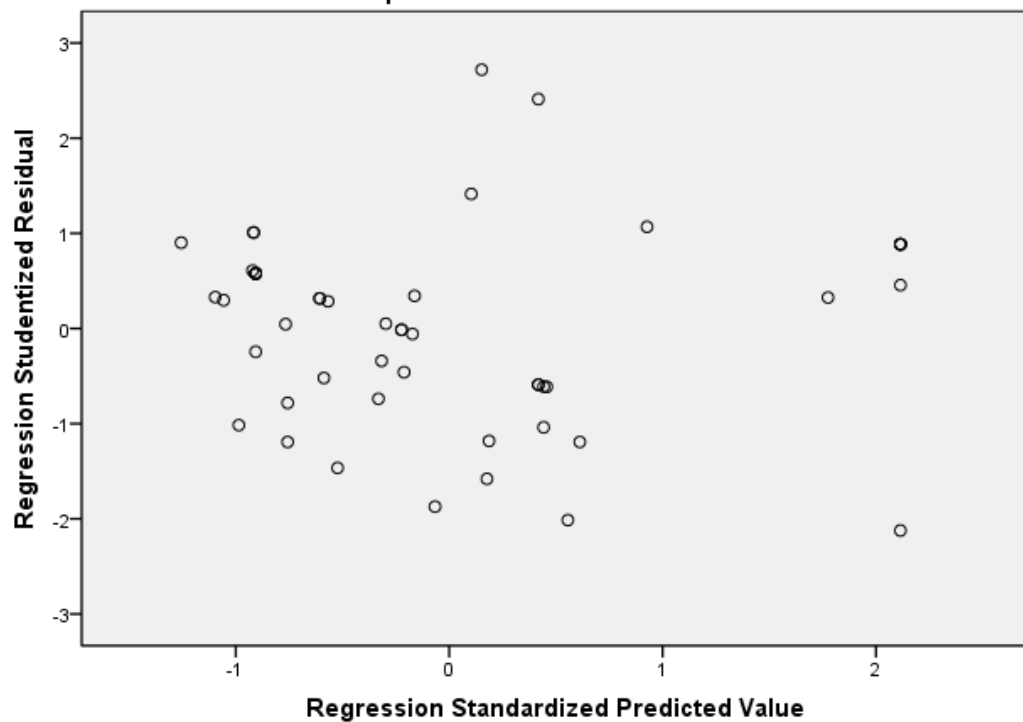
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,562	3,568		,157	,876		
KA	,356	,116	,418	3,059	,004	,663	1,509
PA	-,010	,219	-,007	-,047	,963	,512	1,952
PK	,315	,110	,387	2,858	,006	,675	1,481

a. Dependent Variable: AKB

Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: AKB



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,562	3,568		,157	,876		
KA	,356	,116	,418	3,059	,004	,663	1,509
PA	-,010	,219	-,007	-,047	,963	,512	1,952
PK	,315	,110	,387	2,858	,006	,675	1,481

a. Dependent Variable: AKB

Output ANOVA

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	216,045	3	72,015	11,646	,000 ^a
Residual	284,455	46	6,184		
Total	500,500	49			

a. Predictors: (Constant), PK, KA, PA

b. Dependent Variable: AKB

RIWAYAT HIDUP



Irwan Setiawanto, Lahir di Purwokerto, 21 Mei 1989, adalah anak dari pasangan Yudi Haryoto, dan Sairah, bertempat tinggal di Jl. Hidup Baru Gg L. No 77 RT 003/03, Kel. Pademangan Barat, Jakarta Utara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh, SD Negeri Taman Cibodas, Tangerang (1995-2001); SMP Sejahtera (2001-2004); SMA Negeri 40, Jakarta (2004-2007); dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi(2007-2012)

Penulis adalah seorang yang aktif dalam organisasi. Keaktifannya sudah dimulai sejak penulis duduk di bangku SMA. Penulis pernah diamanahkan menjadi wakil ketua Rohis SMA Negeri 40. Di bangku kuliah saat tahun kedua, penulis menjabat staff Media Center BSO AL Iqtishodi FE UNJ, dan ditahun ketiga, penulis menjabat sebagai Ketua Departemen Syiar BSO Al Iqtishodi, serta staff Sosial Kemasyarakatan KAMMI Komisariat UNJ